

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DRAINASE DI KECAMATAN BOGOR TIMUR

¹Muhammad Prayoga Septiana, yseptiana015@gmail.com

²Irma Purnama Sari, irma.purnamasari@unida.ac.id

³Berry Sastrawan, berry.sastrawan@unida.ac.id

Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Djuanda, Bogor
Indonesia

ABSTRAK

Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Hujan" karena curah hujan tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menuntut sistem drainase yang andal untuk mencegah banjir. Namun, pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan menambah tekanan terhadap infrastruktur drainase. Dinas PUPR Kota Bogor berperan penting dalam pemeliharaan drainase, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan koordinatif di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas PUPR serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah banjir. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 12 responden, terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat desa di enam kelurahan di Kecamatan Bogor Timur. Hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dari pegawai Dinas PUPR terhadap implementasi pemeliharaan drainase berada pada angka rata-rata 76,41%, yang tergolong dalam kategori "Sudah Dilakukan Sepenuhnya". Sementara itu, penilaian dari masyarakat mencatat angka 73,56%, yang termasuk dalam kategori "Dilakukan Sebagian". Perbedaan penilaian ini mencerminkan adanya kesenjangan (gap) antara pelaksana dan penerima manfaat, khususnya dalam aspek komunikasi, keterbukaan informasi, serta konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, perlu peningkatan komunikasi, transparansi, kapasitas SDM, pemerataan kegiatan, dan partisipasi publik agar pemeliharaan drainase lebih merata dan dirasakan masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Dinas PUPR, Pemeliharaan Drainase.

PENDAHULUAN

Banjir terjadi ketika volume air sungai melebihi kapasitasnya dan meluap ke area rendah di sekitarnya. Salah satu penyebabnya adalah limpasan permukaan, yaitu air hujan yang tidak terserap tanah akibat infiltrasi yang terbatas dan penguapan, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan akhirnya menuju sungai atau membentuk genangan (Suripin, Yulaelawati dan Usman dalam Nurrahmah:2015).

Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan "Kota Hujan", Bogor memiliki tingkat curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun. Di sisi lain, pertumbuhan kota yang cepat turut mendorong peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memainkan peranan penting dalam menjaga kinerja sistem drainase, baik melalui pengembangan infrastruktur baru maupun melalui upaya pemeliharaan rutin dan berkelanjutan terhadap jaringan saluran yang sudah ada.

Walaupun kegiatan pemeliharaan drainase telah menjadi bagian dari program rutin tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan alokasi anggaran dan tenaga kerja yang tersedia untuk menjalankan pemeliharaan, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi saluran, serta lemahnya sinergi antar instansi terkait dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, masih banyak ditemukan saluran drainase yang tersumbat, rusak, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kurangnya kesadaran sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan turut memperburuk kondisi ini. Situasi tersebut tidak hanya meningkatkan potensi terjadinya banjir, tetapi juga mengganggu kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak.

Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Bogor Timur, yang menjadi salah satu area prioritas Dinas PUPR karena tingginya frekuensi genangan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pola genangan berdurasi sedang namun berulang, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam sistem drainase, seperti penyumbatan atau kapasitas saluran yang tidak memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di wilayah tersebut bersifat sistemik dan tersebar, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan dan strategi pemeliharaan drainase.

Hasil analisis dan observasi lapangan menunjukkan bahwa banjir di sejumlah wilayah Kota Bogor tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga karena kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan drainase oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR. Tugas ini mencakup perbaikan saluran rusak dan menjaga agar saluran yang ada tetap berfungsi. Di lapangan masih ditemukan saluran tersumbat, genangan yang lambat surut, dan lokasi banjir berulang setiap musim hujan, yang menandakan perlunya penanganan drainase yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dalam pemeliharaan infrastruktur drainase, serta mengidentifikasi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan bagi Pemerintah Kota Bogor, khususnya

Dinas PUPR, dalam pengelolaan sistem drainase. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam strategi mitigasi banjir berbasis kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif sebagai pendekatannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020), Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan bantuan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena berdasarkan data numerik yang diperoleh

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait objek kajian. Adapun teknik yang digunakan meliputi :

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan landasan teoritis, konsep kunci, dan informasi pendukung dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Studi Lapangan (Field Research), Dilakukan untuk memperoleh informasi empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan dalam studi lapangan ini antara lain:
 - a. Wawancara, Digunakan untuk menggali informasi langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam isu penelitian. Metode ini membantu mengidentifikasi permasalahan secara lebih jelas dan mendalam (Sugiyono, 2020)
 - b. Observasi, Dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan untuk mencatat fakta terkait sistem drainase, proses pemeliharaan, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan
 - c. Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti regulasi, laporan, arsip, foto, dan sumber relevan lainnya (Sugiyono, 2020)
 - d. Kuesioner (Angket), Disebarkan kepada responden dari pegawai Dinas PUPR dan masyarakat Kota Bogor yang dipilih sebagai sampel. Instrumen ini berisi pertanyaan untuk mengukur persepsi dan pengetahuan responden, dengan skala Likert sebagai dasar penilaian.

Penelitian ini melibatkan 12 responden, terdiri dari 1 tokoh masyarakat dan 1 aparat desa di tiap kelurahan di Kecamatan Bogor Timur (total 6 kelurahan). Responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan mereka tentang kondisi drainase di wilayahnya. Pendekatan ini bertujuan menggali pandangan aktor lokal terkait pelaksanaan dan efektivitas pemeliharaan drainase oleh Dinas PUPR

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Menurut Sukanto (dalam Khadijah, 2022), peran adalah wujud aktif dari status sosial, di mana seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai posisinya dalam struktur sosial. Meskipun status dan peran dibedakan secara konsep, keduanya saling terkait dan tidak terpisahkan dalam praktik. Peran mendapatkan makna dari status, dan status baru bermakna jika diwujudkan melalui peran nyata.

Sementara itu, drainase berasal dari kata “to drain” yang berarti mengalirkan kelebihan air. Sistem ini dirancang untuk mengelola limpasan air di permukaan maupun bawah tanah. Sebagai bagian dari infrastruktur dasar, drainase berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta menjadi elemen vital dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan kota. Secara umum, drainase berfungsi mencegah genangan dan kerusakan lingkungan (Lucyana, 2020)

Banjir adalah genangan air yang terjadi ketika aliran melampaui kapasitas saluran atau permukaan tanah, sehingga meluap dan menimbulkan kerugian. Umumnya bersifat musiman, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang melebihi daya tampung drainase dan meluas ke permukiman. Bencana ini sering terjadi dan berdampak luas, mengganggu aktivitas warga serta merusak infrastruktur dan stabilitas ekonomi (Balahanti et al., 2023).

Penelitian Faisal Suhanda (2016) berjudul “Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan” menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada evaluasi pembangunan jalan dan jembatan. Berbeda dari kajian drainase, penelitian ini menyoroti ketimpangan distribusi infrastruktur akibat lemahnya perencanaan dan keterbatasan anggaran Dinas PU Kabupaten Mesuji

Perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus dan metode pengambilan sampel. Penelitian ini membahas pemeliharaan drainase sebagai bagian dari infrastruktur lingkungan kota, dengan pendekatan mikro dan berbasis persepsi aktor lokal. Sementara itu, studi Suhanda menyoroti peran Dinas PU dalam pembangunan infrastruktur secara umum dan berskala luas. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan responden yang terlibat langsung dalam isu drainase, sedangkan penelitian Suhanda tidak menjelaskan secara rinci metode sampling yang digunakan.

Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa pemilihan pendekatan metodologis sangat dipengaruhi oleh arah tujuan penelitian, cakupan permasalahan yang dikaji, serta tingkat kedalaman analisis yang ingin dicapai. Penelitian ini secara khusus mengulas peran institusi teknis dalam menjamin keberlanjutan sistem drainase di lingkungan perkotaan. Sementara itu,

studi pembandingan lebih terfokus pada hambatan-hambatan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan secara menyeluruh di wilayah kabupaten.

Penelitian ini mengacu pada teori peran pemerintah dari Sondang P. Siagian (2000 dalam Alex & Maulidiah, 2024), yang menekankan peran strategis pemerintah dalam pembangunan, mencakup fungsi sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana kebijakan publik. Dalam konteks ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis peran Dinas PUPR dalam pemeliharaan drainase. Analisis didasarkan pada tanggapan responden terhadap indikator tiap dimensi peran, untuk menilai efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Rangkuman hasilnya disajikan dalam tabel berikut.

1.1 Dimensi Stabilisator

Dalam konteks pemeliharaan drainase, stabilisator adalah sebuah proses yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur Drainase. Indikator ini mencakup dua sub indikator yang penting, yaitu kemampuan menangani keluhan dan kemampuan mempertahankan standar kualitas.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Indikator Dimensi Stabilisator

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinas PUPR		Aparat Desa dan tokoh Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait pengaduan masyarakat mengenai drainase yang tersumbat atau rusak ditanggapi dengan cepat	90%	Sudah dilakukan sepenuhnya	72,91%	Dilakukan sebagian
2	terkait Petugas pemeliharaan drainase bekerja dengan standar pelayanan yang baik	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	77,08%	Sudah dilakukan sepenuhnya
3	terkait Pemeliharaan memadai untuk menghadapi musim hujan	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya
Jumlah		80,83%	Sudah dilakukan sepenuhnya	74,99%	Dilakukan sebagian

Sumber : Hasil penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, rekapitulasi penilaian dimensi Stabilisator menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara Pegawai Dinas PUPR dan Aparat Desa serta Tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan pemeliharaan drainase. Pegawai Dinas PUPR memberikan penilaian rata-rata sebesar 80,83%, yang berada dalam kategori "Sudah dilaksanakan

sepenuhnya", sedangkan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat memberikan nilai rata-rata 74,99%, yang berada pada batas atas kategori "Dilaksanakan sebagian".

Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi, transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas sistem pelayanan infrastruktur drainase, menjamin fungsinya secara berkelanjutan terutama saat musim hujan, serta memastikan respons cepat dan efektif terhadap setiap keluhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang telah dibangun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

1.2 Dimensi Inovator

Inovasi dalam pemeliharaan drainase merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru dalam upaya meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur drainase. Untuk mewujudkan pemeliharaan drainase yang efektif dan efisien, dibutuhkan monitoring, baik ketika maupun sesudah pemeliharaan berlangsung.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Indikator Dimensi Inovator

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinas PUPR		Aparat Desa dan tokoh Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait penerapan metode atau inovasi baru dalam pemeliharaan saluran drainase	71,25%	Dilakukan sebagian	72,91%	Dilakukan sebagian
2	Terkait pemeliharaan Drainase melibatkan informasi dari masyarakat	76,25%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	79,16%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya
3	Terkait pemeriksaan ulang secara berkala untuk memastikan saluran	71,25%	Dilakukan sebagian	72,91%	Dilakukan sebagian
Jumlah		72,91%	Dilakukan sebagian	74,99%	Dilakukan sebagian

(Sumber : Hasil Penelitian, 2025)

Berdasarkan data rekapitulasi terhadap tiga indikator dalam dimensi Inovator, terlihat bahwa baik Pegawai Dinas PUPR maupun Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat secara umum memberikan penilaian dalam kategori “Dilakukan Sebagian”, dengan rata-rata nilai masing-masing sebesar 72,91% dan 74,99%. Meskipun dimensi Inovator mendapat penilaian “Dilakukan sebagian“, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai agen pembaruan

belum sepenuhnya maksimal. Inovasi belum menjangkau seluruh aspek penting pemeliharaan drainase secara komprehensif, baik dari sisi teknologi, strategi kerja, maupun pendekatan sosial.

1.3 Dimensi Modernisator

Modernisator mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan dan manajemen yang lebih efisien terhadap kondisi saluran drainase. meminimalkan kemungkinan penundaan atau kesalahan dalam penanganan masalah. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengaduan menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Drainase.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Indikator Dimensi Modernisator

No	Item Pernyataan	Pegawai Dinas PUPR		Aparat Desa dan tokoh Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait memanfaatkan teknologi informasi, untuk memantau saluran drainase	72,50%	Dilakukan sebagian	70,83%	Dilakukan sebagian
2	Terkait sistem pengaduan berbasis teknologi, seperti melalui aplikasi atau website	72,50%	Dilakukan sebagian	68,75%	Dilakukan sebagian
3	Terkait diberikan ruang untuk melaporkan kondisi Drainase yang rusak atau tersumbat	78,75%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya
Jumlah		74,58	Dilakukan sebagian	71,52%	Dilakukan sebagian

(Sumber : Hasil Penelitian, 2025)

Berdasarkan rekapitulasi tiga indikator pada dimensi Modernisator, terlihat bahwa implementasi modernisasi dalam pemeliharaan drainase di Kota Bogor telah berjalan “Dilakukan sebagian” atau bisa dikatakan dengan kategori cukup baik, meskipun tingkat pencapaian antar kelompok responden menunjukkan sedikit perbedaan. Pegawai Dinas PUPR memberikan rata-rata penilaian sebesar 74,58%, yang masuk dalam kategori “Dilakukan Sebagian”, sementara Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat memberikan rata-rata penilaian sebesar 71,52%, yang juga berada pada kategori “Dilakukan Sebagian”. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai Modernisator telah berjalan ke arah yang benar, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat.

1.4 Dimensi Pelopor

pelopor harus memiliki kemampuan mengambil risiko dan tanggung jawab yang tinggi. Pelopor perlu mampu mengevaluasi risiko yang ada, baik dari segi teknis, keuangan, maupun operasional, dan kemudian membuat keputusan yang berani namun tetap terinformasi. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk meminimalisir dampak negatif dari berbagai risiko yang muncul, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang ada demi peningkatan kualitas infrastruktur Drainase.

Tabel 1. 4
Rekapitulasi Indikator Dimensi Pelopor

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinas PUPR		Aparat Desa dan tokoh Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Infrasrtuktur Drainase di perbaiki agar tidak ditemukan kerusakan	76,25%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	77,08%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya
2	Terkait secara rutin membersihkan saluran drainase dari sampah dan sedimentasi	78,75%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	66,66%	Dilakukan sebagian
3	banjir akibat hujan lebat, atau adanya genangan, mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.	75%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	72,91%	Dilakukan sebagian
4	Terkait bekerja sama dengan RT/RW atau kelurahan Dalam memelihara Drainase	77,50%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	77,08%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya
Jumlah		76,87%	Sudah Dilakukan Sepenuhnya	73,43%	Dilakukan sebagian

(Sumber : hasil penelitian, 2025)

Dimensi Pelopor dalam dalam pemeliharaan infrastruktur drainase mengacu pada peran aktif Dinas PUPR Kota Bogor dalam menginisiasi tindakan perbaikan, merespons gangguan secara cepat, serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mencegah dan menangani permasalahan seperti genangan air dan kerusakan saluran drainase. Berdasarkan rekapitulasi empat indikator utama pada dimensi ini, Pegawai Dinas PUPR memberikan rata-rata penilaian sebesar 76,87%, yang masuk dalam kategori “Sudah Dilakukan Sepenuhnya”. Sementara itu, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat memberikan rata-rata penilaian sebesar 73,43%, yang berada pada kategori “Dilakukan Sebagian”.

Untuk itu, diperlukan strategi pemerataan pelaksanaan kegiatan, termasuk pembersihan saluran secara berkala di seluruh wilayah Kota Bogor, serta sosialisasi dan pelibatan aktif

masyarakat dalam program-program pemeliharaan. Dengan langkah ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan publik, sekaligus menjadikan peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengelolaan drainase lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.5 Dimensi Pelaksana

Sebagai pelaksana, Kemampuan ini mencakup proses identifikasi, perencanaan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan Drainase berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Penetapan kegiatan melibatkan analisis kondisi Saluran, identifikasi prioritas pemeliharaan, alokasi sumber daya, serta penjadwalan pekerjaan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan dana. Harus memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. SOP merupakan pedoman kerja yang memastikan setiap langkah dalam proses pemeliharaan Drainase dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil akhir.

Tabel 1. 5
Rekapitulasi Indikator Dimensi Pelaksana

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinas PUPR		Aparat Desa dan tokoh Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	terkait PUPR memiliki program rutin pemeliharaan drainase di tiap wilayah responden	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	68,75%	Dilakukan sebagian
2	Tanggapan Responden terkait Informasi mengenai jadwal pemeliharaan drainase di sosialisasikan	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya
3	terkait pemeliharaan drainase dilakukan sesuai prosedur tetap	77,50%	Sudah dilakukan sepenuhnya	70,83%	Dilakukan sebagian
4	Tanggapan Responden terkait Pemeliharaan drainase dilakukan berdasarkan prioritas wilayah rawan banjir	77,50%	Sudah dilakukan sepenuhnya	77,08%	Sudah dilakukan sepenuhnya
Jumlah		76,87%	Sudah dilakukan sepenuhnya	72,91%	Dilakukan sebagian

Sumber : Hasil penelitian 2025

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi Pelaksana dalam peran Dinas PUPR Kota Bogor memperoleh persepsi yang positif namun bervariasi dari dua kelompok responden. Dari sisi Pegawai Dinas PUPR, rata-rata penilaian berada di angka 76,87%, yang termasuk dalam kategori “Sudah Dilakukan Sepenuhnya”. Ini mencerminkan bahwa pegawai internal merasa seluruh proses pelaksanaan, mulai dari program rutin,

sosialisasi jadwal, pelaksanaan prosedur, hingga penetapan wilayah prioritas, telah berjalan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dinas PUPR telah memenuhi perannya sebagai pelaksana teknis dalam pemeliharaan drainase dengan baik.

Sementara itu, dari Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat, nilai rata-rata berada pada 72,91%, yang masuk dalam kategori “Dilakukan Sebagian”. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah persepsi dan pengalaman langsung di lapangan. Meskipun dua dari empat indikator dinilai “Sudah Dilakukan Sepenuhnya” (yaitu terkait sosialisasi jadwal dan prioritas wilayah rawan banjir), dua indikator lainnya masih berada pada tingkat “Dilakukan Sebagian” yakni program rutin pemeliharaan di tiap wilayah dan pelaksanaan sesuai prosedur tetap, memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melihat atau merasakan pelaksanaan yang merata dan transparan.

2. Pembahasan

Studi Purnamasari et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap efektivitas, kejelasan prosedur, dan akses informasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, khususnya pada dimensi Pelaksana, di mana meskipun program rutin telah dijalankan oleh Dinas PUPR, namun masyarakat masih menilai pelaksanaannya “Dilakukan Sebagian”. Ini mengindikasikan pentingnya penguatan pada aspek sosialisasi dan keterbukaan informasi publik.

Penelitian oleh Sastrawan et al. (2024) menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keberlanjutan layanan publik berbasis kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks drainase, hal ini relevan karena pemeliharaan infrastruktur saluran air termasuk dalam kategori layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif, termasuk wawancara terhadap pegawai Dinas PUPR, aparat desa, dan tokoh masyarakat di 6 kelurahan di Kecamatan Bogor Timur, diperoleh gambaran bahwa secara umum Dinas PUPR telah melaksanakan perannya “Sudah dilakukan sepenuhnya. menurut Pegawai Dinas PUPR” dan Dilakukan sebagian menurut Aparat Desa dan Tokoh masyarakat Namun, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi sumber permasalahan dijelaskan dengan tiap dimensi yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Peran Pemeliharaan Infrastruktur Drainase Oleh Dinas PUPR

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai Dinas PUPR		Aparat desa dan Tokoh Masyarakat	
			Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
		kemampuan menangani keluhan	90%	Sudah dilakukan sepenuhnya	72,91%	Dilakukan sebagian

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai Dinas PUPR		Aparat desa dan Tokoh Masyarakat	
			Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Peran Pemerintah	Stabilisator	kemampuan mempertahankan standar kualitas	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	77,08%	Sudah dilakukan sepenuhnya
		Tingkat Kebersihan Saluran Drainase	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya
	Rata-Rata mengembangkan dan		80,83%	sepenuhnya	74,99%	sebagian
	Inovator	menerapkan inovasi metode pemeliharaan Keterlibatan	71,25%	Dilakukan sebagian	72,91%	Dilakukan sebagian
		Masyarakat dalam Pelaksanaan monitoring secara rutin	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	79,16%	Sudah dilakukan sepenuhnya
	Rata-Rata Pemanfaatan teknologi		72,91%	sebagian	74,99%	sebagian
	Modernisator	informasi dalam sistem pemantauan	72,50%	Dilakukan sebagian	70,83%	Dilakukan sebagian
		Tersedianya sistem pengaduan berbasis teknologi	72,50%	Dilakukan sebagian	68,75%	Dilakukan sebagian
		Kemudahan Akses Pelaporan oleh Masyarakat	78,75%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya
	Rata-Rata pemeliharaan		74,58	sebagian	71,52%	sebagian
Pelopor	infrastruktur drainase yang jelas, terukur, dan terikat waktu	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	77,08%	Sudah dilakukan sepenuhnya	
	Frekuensi Pembersihan Drainase	78,75%	Sudah dilakukan sepenuhnya	66,66%	Dilakukan sebagian	

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai Dinas PUPR	Aparat desa dan Tokoh Masyarakat			
			Mean	Kriteria	Mean	Kriteria	
			Rata-Rata	76,87%	Sudah dilakukan sepenuhnya	73,43%	Dilakukan sebagian
		mengidentifikasi,					
		merencanakan, dan mengatur kegiatan pemeliharaan	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	68,75%	Dilakukan sebagian	
Pelaksana		Ketersediaan Jadwal Pemeliharaan yang Diumumkan Secara Terbuka	76,25%	Sudah dilakukan sepenuhnya	75%	Sudah dilakukan sepenuhnya	
		(SOP), memastikan kualitas, efisiensi, dan konsistensi hasil pekerjaan	77,50%	Sudah dilakukan sepenuhnya	70,83%	Dilakukan sebagian	
		Adanya Skala Prioritas dalam Pemeliharaan	77,50%	Sudah dilakukan sepenuhnya	77,08%	Sudah dilakukan sepenuhnya	
				Sudah dilakukan sepenuhnya		Dilakukan sepenuhnya	
		Rata-Rata		76,87%	dilakukan sepenuhnya	72,91%	sebagian
		Total Rata-Rata	76,41%	dilakukan sepenuhnya	73,56%	sebagian	

(Sumber : Hasil Penelitian, 2025)

Berdasarkan hasil rekapitulasi lima dimensi peran pemerintah, yaitu sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana, hasilnya Dari keseluruhan dimensi pegawai Dinas PUPR memberikan nilai rata-rata 76,41% yang tergolong "Sudah Dilakukan Sepenuhnya", sementara masyarakat memberikan nilai 73,56% dalam kategori "Dilakukan Sebagian". Perbedaan penilaian ini mengindikasikan adanya gap antara pelaksana dan penerima manfaat, terutama dalam hal komunikasi, keterbukaan informasi, dan konsistensi pelaksanaan.

Dari perbandingan di atas, dimensi "Stabilisator" menjadi yang paling tinggi dengan nilai 80,83% Dengan kategori Sudah dilakukan sepenuhnya oleh pegawai Dinas PUPR. Selanjutnya , penilaian paling tinggi dari Aparat Desa dan Tokoh masyarakat yaitu 74,99% dengan nilai

Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 10 (2025), e-ISSN 2963-590X | Septiana et al. yang sama ada pada dimensi “Stabilisator dan Inovator”. Dengan kategori dilakukan sebagian. Penilaian Terendah dari Pegawai Dinas PUPR ada di Dimensi Inovator dengan Rata-rata Skor 72,91% Kategori Dilakukan Sebagian. Penilaian Terendah dari Masyarakat & Aparat Desa Dimensi berada di dimensi Modernisator Rata-rata Skor 71,52% Kategori Dilakukan Sebagian.

Maka dari itu, peran Dinas PUPR Kota Bogor dinilai telah "Sudah Dilakukan Sepenuhnya" menurut internal pegawai, namun masih tergolong "Dilakukan Sebagian" menurut persepsi eksternal masyarakat. Perbedaan persepsi ini menjadi catatan penting yang menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pada aspek pemerataan pelaksanaan, penguatan inovasi yang terasa langsung di lapangan, serta peningkatan komunikasi dan pelibatan aktif masyarakat guna menyelaraskan ekspektasi dan realisasi di lapangan secara lebih merata dan transparan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dinas PUPR dalam pemeliharaan drainase berada pada kategori "Dilakukan Sebagian". Penilaian internal oleh pegawai Dinas PUPR dengan mencatat skor rata-rata 76,41%, secara internal. Sementara itu, aparat desa dan tokoh masyarakat memberikan nilai rata-rata 73,56%, yang menunjukkan bahwa persepsi publik belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

Untuk meningkatkan efektivitas, Dinas PUPR telah menerapkan sejumlah strategi, seperti penyusunan SOP, penetapan skala prioritas wilayah rawan banjir, pembersihan saluran secara rutin melalui gotong royong, serta pemanfaatan teknologi melalui aplikasi SiBadra dan sistem pemetaan berbasis GIS. Keterlibatan masyarakat juga terus didorong, khususnya dalam pemantauan dan pelaporan kondisi saluran.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi akademis, tetapi juga menjadi acuan nyata bagi peningkatan kualitas pemeliharaan drainase. Pemerintah Kota Bogor diharapkan memanfaatkan temuan ini untuk memperkuat kolaborasi antar pihak, meningkatkan transparansi layanan publik, dan membangun sistem drainase yang lebih adil, merata, serta berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, penanganan banjir dapat bergeser dari tindakan reaktif menjadi strategi pencegahan yang sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, M., & Maulidiah, S. (2024). Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3), 390–399.
- Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 11, 69–79. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/download/51447/44169/121650>

- Departemen Pekerjaan Umum. (2005). Departemen Pekerjaan Umum tentang Jalan. In *Departemen Pekerjaan Umum*.
- Fahmi, A. (2022). Efek spasial infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. *Akuntabel*, 19(2), 468–474. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10934>
- Fairizi, D. (2015). file:///F:/Jurnal Drainase/Pemodelan Bahaya Banjir Kawasan Perkotaan Kota Kendari.pdf. *Sipil, Jurusan Teknik Sriwijaya, Universitas Besar, Bukit Sumatera, Palembang*, 3(No. 1).
- Falah, M. M., Purnamasari, I., & Sastrawan, B. (2024). Kualitas Pelayanan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Mobile Kabupaten Bogor di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1180–1191. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11570>
- Hermawan, C., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Pengendalian Banjir di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Ilmu Pemerintah*, 7(1), 465–478.
- Khadijah, I. (2022). *Peranan Serta Komponen Kompetensi Penting Yang Harus Di Miliki Seorang Guru Profesional*. 1–15. <https://osf.io/preprints/hn5cy/%0Ahttps://osf.io/hn5cy/download>
- Lucyana, L. (2020). Analisis Sistem Saluran Drainase Pada Perumahan Baturaja Permai Dikota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Deformasi*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.31851/deformasi.v5i1.4233>

- Nezha, R. (2014). peran dinas pu dalam pengawasan proyek jalan di desa barana kecamatan bangkala barat kabupaten jenepontotitle. 1–203.
- Praventy, I. (2024). *Peran Humas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Dalam Mensosialisasikan Program Pengelolaan Drainase Di Kota Pekanbaru*. 1–77.
- Purnamasari, I., Ramdani, F. T., & Sastrawan, B. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(6), 7201–7209.
- Rahayu, N. (2019). *Peran dalam Struktur Sosial Masyarakat*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya Press
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642>
- Siagian, S. P. (2000). *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Rineka Cipta.
- Sugiyono (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta. ISBN 978-602-289-533-6
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suhanda, F. (2016). PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN MESUJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN Studi di Kecamatan Tanjung Raya).